

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan suatu sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Karena ekonomi kerakyatan sendiri merupakan kegiatan perekonomian atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan yang secara swadaya mengelola sumber daya ekonomi yang mampu diusahakan dan kuasanya, mereka mengharapkan bisa terpenuhi kebutuhan dasar keluarga dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekelilingnya (Hasmawati,F. 2018).

Bahfein (2019) menyatakan luas lahan baku lahan sawah sebesar 7,64 juta hektar. serta luas lahan perkebunan karet nasional mencapai 3,67 juta hektar. Program pemerintah untuk mendukung sektor pertanian atau perkebunan dapat diketahui dari program kabinet kerja mengarahkan pembangunan pertanian atau perkebunan ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan guna meningkatkan kesejahteraan petani, maka Kementerian Pertanian menyusun dan melaksanakan 7 Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P₃KP) yang terdiri dari (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian.

Pembangunan sektor pertanian dapat dilaksanakan dengan menggunakan teknologi pertanian modern yang efektif dan efisien (Sulaiman, A. 2021). Aktivitas pertanian tidak bisa lepas dari kebutuhan pupuk untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, kenyataan yang terjadi ditingkat petani adalah sering terjadi kelangkaan pupuk disaat petani membutuhkan. Untuk mengatasi kelangkaan pupuk, pemerintah menetapkan kebijakan melalui Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang berfungsi sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan

pemerintah dalam mengawasi alokasi pupuk bersubsidi. Menurut Peraturan Pemerintah yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian RI No. 01 tahun 2020, pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian. Terdapat lima jenis pupuk bersubsidi dalam pengawasan yang di alokasikan untuk petani yaitu urea, SP 36, ZA, NPK dan organik.

Permentan nomor 01 (2020) menyatakan tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 kebijakan pemerintah dalam pengawasan pupuk bersubsidi di tingkat petani dengan menghadirkan Program Kartu Tani, dimana diharapkan dengan adanya kartu tani dapat meminimalisir permasalahan dalam pengawasan, pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi. Kartu tani bagi petani dapat digunakan sebagai alat penebus pupuk bersubsidi, tabungan bagi petani, tarik tunai, belanja sehari-hari, pembayaran tagihan dan transfer antar bank. Untuk mendapatkan kartu tani petani harus tergabung dalam kelompok tani. Jenis dan jumlah pupuk subsidi yang diterima petani melalui kartu tani sesuai dengan luas lahan, komoditas dan jenis pupuk yang disusun melalui rencana definitif kebutuhan kelompok (RDKK) oleh penyuluh pertanian bersama petani yang kemudian di *upload* ke sistem elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (*e*-RDKK). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia (BNI), menghadirkan kartu tani sebagai sarana dalam mengoptimalkan kebijakan pupuk bersubsidi bagi masyarakat. Kartu tani, merupakan kartu debit BNI *cobranding* yang digunakan secara khusus untuk membaca alokasi pupuk bersubsidi dan transaksi pembayaran pupuk bersubsidi di mesin EDC (*Electronic Data Capture*) BNI yang ditempatkan di pengecer serta dapat berfungsi untuk melakukan seluruh transaksi perbankan pada umumnya. Penggunaan kartu tani terintegrasi dengan Aplikasi Sistem *e*-RDKK (Elektronik-RDKK). Sistem tersebut berisikan data RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang terdiri dari nama petani, luas lahan, jenis tanaman, dan alokasi pupuk yang dibutuhkan petani.

Jumlah petani yang terdaftar disistem *e*-RDKK Kementerian Pertanian untuk wilayah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2022 dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1. Jumlah Petani Terdaftar Di Sistem *e*-RDKK Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2020-2022

Kecamatan	Jumlah Petani Terdaftar		
	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022
Sinar Peninjauan	3.938	4.802	5.209
Muara Jaya	533	590	616
Sosoh Buay Rayap	1.453	1.763	1.917
Lubuk Raja	3.064	3.522	3.425
Pengandonan	1.157	1.253	1.255
Peninjauan	1.837	2.311	2.691
Kedaton Peninjauan Raya	613	1.227	1.079
Lubuk Batang	528	777	1.089
Lengkiti	2.487	2.700	3.516
Baturaja Barat	417	432	456
Baturaja Timur	865	980	1.097
Semidang Aji	1.411	1.401	1.419
Ulu Ogan	308	503	665
Total	18.611	22.261	24.434

Sumber: Sistem *e*-RDKK Kementerian Pertanian

Tabel 1.1 diatas menunjukkan jumlah petani Kabupaten Ogan Komering Ulu yang berhasil diinput di system *e*-RDKK untuk tahun 2022 sejumlah 24.434 orang, dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Sinar Peninjauan sejumlah 5.209 orang, disusul Kecamatan Lengkiti sejumlah 3.516 orang lalu Kecamatan Lubuk Raja sejumlah 3.425 orang.

Adapun jumlah kartu tani tercetak di Kecamatan Sinar Peninjauan, dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini :

Tabel 1.2. Jumlah kartu tani tercetak di Kecamatan Sinar Peninjauan

Desa	Kartu Tani Tercetak
Marga Bhakti	741
Karya Mukti	492
Karya Jaya	410
Sri Mulya	64
Marga Mulya	287
Tanjung Makmur	271
Total	2.265

Sumber: Data Balai Penyuluhan Pertanian Karya Mukti

Tabel 1.2 di atas menunjukkan jumlah kartu tani tercetak di Kecamatan Sinar Peninjauan untuk Desa Marga Bhakti 741, Desa Karya Mukti kartu tani yang tercetak adalah sejumlah 492, Desa Karya Jaya kartu tani yang tercetak adalah sejumlah 410, Desa Sri Mulya kartu tani yang tercetak adalah sejumlah 64, Desa Marga Mulya kartu tani yang tercetak adalah sejumlah 287, Desa Tanjung Makmur kartu tani yang tercetak adalah sejumlah 271.

Jumlah Petani yang menebus pupuk bersubsidi di Kecamatan Sinar Peninjauan pada semester I tahun 2021 atau bulan Februari-Juli 2021 dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.3. Jumlah Petani yang menebus pupuk bersubsidi di Kecamatan Sinar Peninjauan bulan Februari-Juli 2021

Bulan	Desa Marga Bhakti	Desa Karya Mukti	Desa Karya Jaya	Desa Sri Mulya	Desa Marga Mulya	Desa Tanjung Makmur	Jumlah
Februari	50	0	0	0	0	0	50
Maret	100	37	111	20	0	0	268
April	161	45	55	65	0	34	360
Mei	267	35	0	30	0	75	407
Juni	61	31	155	0	0	0	247
Juli	266	0	36	0	0	62	364
Total	905	148	357	115	0	171	1696

Sumber: Sistem e-Verval Pupuk Bersubsidi Kementerian Pertanian

Tabel 1.3 diatas dapat diketahui petani yang menebus pupuk bersubsidi pada semester pertama tahun 2021 untuk Desa Marga Bhakti sejumlah 905 petani,

untuk Desa Karya Mukti sejumlah 148 petani, untuk Desa Karya Jaya sejumlah 357 petani, untuk Desa Sri Mulya sejumlah 115 petani, untuk Desa Marga Mulya sejumlah 0 petani dan untuk Desa Tanjung Makmur sejumlah 171 yang keseluruhan penebusan pupuk pada semester pertama tahun 2021 berjumlah 1696 petani.

Penelitian tentang pelaksanaan program kartu tani sangat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan kartu tani sebagai kebijakan pemerintah untuk alat penebusan pupuk bersubsidi diharapkan efektif dalam proses pelaksanaannya, akan tetapi program ini ditujukan kepada petani yang sebagian besar memiliki latar belakang pendidikan rendah dengan kemampuan mengaplikasikan teknologi yang terbatas. Sehingga keberhasilan dari program ini didukung oleh pengetahuan petani dalam menggunakan kartu tani. (Ryan, *et al.* 2019).

Latifah, M (2019) menyatakan faktor ukuran tingkat efektivitas program kartu Tani dapat diukur dari :

1. Keberhasilan Sasaran.
2. Pencapaian tujuan yang menyeluruh.
3. Tersedianya sarana dan prasarana.
4. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Sedangkan faktor penghambat program kartu tani dapat memperhatikan :

1. Kondisi Lingkungan.
2. Sumber Daya.

Azida (2017) menyatakan aspek bank, aspek kios pengecer, aspek petani, dan aspek pemerintah adalah factor yang mempengaruhi keberhasilan program kartu tani. Isabela (2020) menyatakan efektivitas penggunaan kartu tani dipengaruhi oleh keberhasilan program, keberhasilan sasaran dan kepuasan terhadap program. Sedangkan menurut Poziah (2020) hambatan dalam pelaksanaan program kartu tani antara lain kondisi lingkungan, sumber daya, kemampuan agen pelaksana, terjadinya penyelewengan distribusi pupuk bersubsidi sehingga terjadi kelangkaan pupuk. Oleh karena itu penelitian terkait program kartu tani di Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu perlu dilakukan. Hal ini untuk menunjang kebijakan pemerintah tentang

gambaran nyata di lapangan faktor apa saja yang dapat menghambat kebijakan program kartu tani serta dapat memberikan solusi penyelesaiannya. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui strategi yang sebaiknya dilakukan untuk efektivitas program kartu tani di Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu, serta dapat menjadi referensi untuk penelitian terkait.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti merumuskan masalah strategi apa saja yang dapat diterapkan untuk efektivitas program kartu tani di Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian untuk menganalisis strategi yang dapat dilakukan dalam efektivitas program kartu tani di Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.